

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas korupsi yang diwacanakan dalam film-film independen di Indonesia. Signifikansi penelitian ini adalah film independen sebagai media *sidestream*, merupakan media bagi pembuat film untuk menyampaikan ideologi yang berperan menjadi kontrol sosial di masyarakat. Istilah *side-stream* meminjam dari sebutan Gotot Prakosa yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti kanal-kanal alternatif dan bawah tanah. (Prakosa, 2005, hal. 3) Peneliti berasumsi, film independen dengan durasinya yang relatif pendek bisa lebih selektif dalam mengungkap materi (tentang korupsi) yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Dengan demikian, setiap *shot* akan memiliki makna yang cukup besar untuk ditafsirkan oleh penontonnya. Film independen bisa menjadi *counter-culture* dari film-film komersil yang jarang menggunakan tema korupsi sebagai premis utama dalam film. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Chairun Nissa, salah satu pembuat film *Kita vs Korupsi* yang menilai selama ini memang jarang pembuat film mengangkat tema anti korupsi. Padahal fenomena korupsi kerap ditemui di sekitar kehidupan masyarakat sehari-hari. (Andrianto, 2015) Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis dengan tipe penelitian kualitatif eksploratif.

Media massa memiliki peranan penting dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, yakni menjadi media yang melakukan penyampaian pengetahuan kepada masyarakat terkait banyak hal, salah satunya adalah korupsi. '[P]eran penting media massa di bidang pencegahan korupsi, antara lain, diwujudkan dalam bentuk memberi informasi kepada masyarakat tentang makna korupsi' (Kalam, 2013). Pemberian informasi tersebut, bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mana yang termasuk korupsi dan bukan korupsi, sehingga dampak jangka panjangnya bisa membuat masyarakat ikut membangun *good governance* (prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi). Hanya saja media massa saat ini sangat sulit melakukan peran tersebut, disebabkan salah satu faktornya adalah adanya konglomerasi media, di mana media dimiliki oleh segelintir orang saja dan berpengaruh pada isi atau konten media yang ada di Indonesia. Sehingga susah untuk menciptakan media massa yang independen dan bebas.

[D]alam iklim reformasi dan keterbukaan informasi publik, seyogyanya masyarakat bukan hanya mampu memperoleh informasi tentang pembangunan dan kemajuan daerahnya masing-masing, namun juga berhak mendapatkan informasi seputar korupsi termasuk wajah-wajah para koruptornya, baik di daerah maupun pusat. Sangat disayangkan jika masyarakat kecil pedesaan sampai tidak mengenali koruptor-koruptor perampok uang rakyat. (Van, 2012)

Hal tersebut menunjukkan bahwa media massa kurang bisa menjalankan perannya sebagai alat kontrol sosial dalam hal korupsi di Indonesia. Terdapat juga pendapat lain yang menguatkan mengenai kurang maksimalnya peran media massa sebagai alat kontrol sosial.

[P]ada masa reformasi ini, meskipun pers telah memiliki kebebasan berpartisipasi dalam peran dan fungsinya sebagai kontrol sosial, ternyata masih banyak oknum pemerintah atau pejabat negara yang tersandung kasus korupsi. Bahkan negara kita termasuk negara yang masuk dalam 5 besar negara paling korup. Jika dicermati, mulai dari anggaran yang disusun oleh DPR sudah dapat dicitum aroma korupsi. Sudah dapat dipastikan, hal itu akan terus berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. (Andi, 2015)

Menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia selain butuh diberitakan secara berimbang oleh media massa, tetapi juga dekat kaitannya dengan negara atau pemerintah.

[M]edia massa – yang sering disingkat media – adalah channel, saluran, sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (*channel of mass communication*). Sedangkan yang termasuk dalam *the big five of mass media* adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film, termasuk juga internet (cyber media, media online). (Tea, 2012)

Sehingga jelas disebutkan bahwa film adalah salah satu bentuk media massa. Definisi film menurut UU 8/1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, dan / atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan / atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan / atau lainnya. Film menjadi media yang sangat berpengaruh, melebihi media-media yang lain, karena secara audio dan visual, film bekerja sama dengan baik dalam membuat penontonya tidak bosan dan lebih mudah diingat karena formatnya menarik.

Film menurut pusat apresiasi film dibagi menjadi dua, yaitu *mainstream* dan *sidestream*. Istilah film *mainstream* ditujukan kepada film-film yang diproduksi oleh studio-studio besar yang bertujuan menghibur masyarakat dengan meraup keuntungan sebesar-besarnya, biasanya berdurasi panjang (90-100 menit). Film-film *mainstream* lebih dianggap barang dagangan (industri) ketimbang dianggap sebagai sebuah karya seni. Secara umum *film mainstream* memiliki beberapa karakteristik, ide yang dipakai biasanya adalah yang populer karena bertujuan komersial, modal disediakan oleh orang atau instansi tertentu yang berposisi sebagai produser, menggunakan *public figure* sebagai pemain untuk menarik minat penonton, dan ada proses sensor dari lembaga perfilman yang terkait. Sedangkan film *sidestream* adalah film independen. Kata *independent* (bahasa Inggris) yang berarti merdeka, berdiri sendiri, berjiwa bebas, tidak dikuasai/dipengaruhi kekuatan lain. Kata 'indie', dalam film indie, mengartikan semangat kebebasan dan kemandirian *film maker* dalam berkarya, yang lebih menekankan film sebagai media untuk menyampaikan pesan dan mengekspresikan kesinemaan seorang *film maker*, bukan ladang 'komersialisme' bagi para pemilik modal. (Joseph, 2011)

Tidak banyak film komersial (*mainstream*) yang membahas mengenai korupsi sebagai tema utama. Adapun beberapa film komersial yang terdaftar di *filmindonesia.or.id* yang membahas korupsi adalah *The Raid 2 : Berandal* (2014) dan *Sang Martir* (2012), sedangkan film-film lain yang bertema korupsi lebih banyak adalah film independen. Dari kedua film tersebut, salah satunya yakni *Sang Martir*, menggunakan kasus korupsi bukan sebagai tema utama dalam film.

Selanjutnya, film independen di Indonesia muncul sebagai bentuk resistensi dari film-film komersial yang memiliki kecenderungan cerita dan tema yang hampir sama dan selain itu karena tidak tersedianya media untuk berekspresi.

[M]aka dari itu, film independen (indie) disebut sebagai film-film alternatif di luar film-film *mainstream*, yang produksi dan distribusinya berdasarkan semangat independen para pembuat film yang cenderung berkarakter dekonstruktif dan eksperimental. Sebuah film menjadi film indie saat nurani si film maker



menginginkannya menjadi suatu yang *independent*, terlepas dari latar belakang proses produksi film atau mungkin juga sebuah karakter personal yang menjadi gaya si *film maker* untuk membuatnya sebuah art. Sehingga sebuah film indie dapat dilihat dari semangat dan nurani si *film maker*. (Joseph, 2011)

Dalam Buku Soemoedihardjo (2008) dijelaskan bahwa '[k]orupsi secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata / ucapan yang menghina atau memfitnah (The Lexion Webster Dictionary 1978)'. Sedangkan menurut :

[P]asal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- (Djaja, 2008, hal. 33)

[P]ada 2013 lalu, organisasi dunia, *transparency.org* merilis ada 10 negara terkorup di dunia. Dan dari 10 negara itu, Indonesia berada di peringkat ke-5, di bawah Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, dan Kamerun. Sedangkan di wilayah Asia Pasifik, Indonesia menjadi negara terkorup dengan menempati posisi pertama. (Republika, 2014)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi menjadi ancaman serius negara ini.

Di dalam Perpres no. 55 tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirancang 6

strategi, yaitu pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional dan penyelamatan asset hasil tipikor, pendidikan dan budaya antikorupsi, dan mekanisme pelaporan dan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Lantas, korupsi bisa disebut sebagai sebuah wacana karena korupsi tidak bisa terlepas dari banyak hal yang saling terkait. Beberapa di antaranya adalah siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam korupsi, bagaimana peranan negara dalam memberantas korupsi sebagai pihak yang memiliki power dan wewenang untuk membuat kebijakan. Menurut '[L]ord Acton, salah satu guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, menyatakan *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)' (Maon, 2011).

Media massa seharusnya memiliki peran dalam memberantas korupsi di Indonesia, yaitu menjadi alat kontrol sosial.

[D]alam konteks saat ini, peran media massa dituntut untuk mampu mengangkat berbagai berita korupsi di level pemerintahan secara objektif. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi media untuk tidak mendukung pemberantasan korupsi di tanah air melalui pengungkapan dan liputan kasus-kasus korupsi. Misalnya untuk peliputan kasus korupsi, peran media sangat relevan dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Pers Pers 40/1999. Dalam pasal 6 Undang-Undang ini disebutkan bahwa media harus tetap bisa menjalankan kontrol perilaku, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik. (Kalam, 2013)

Sayangnya peranan tersebut masih belum dimaksimalkan oleh media massa di Indonesia. Masih banyak media yang belum sepenuhnya

independen dan objektif dari kepentingan tertentu (contoh : pemilik media).

[P]endapat yang mengatakan bahwa peran media massa kurang efektif dalam memberantas korupsi adalah dalam melawan korupsi, misalnya, media di Indonesia masih sebagai pemandu sorak (cheerleaders) atau corong pengeras suara (megaphones) dari kelompok anti korupsi atau aparat yang menangani kasus korupsi. Media belum bisa menjadi sopir yang berada di depan dan mengendalikan agenda, melainkan baru sebagai penumpang yang duduk di belakang aksi anti korupsi. Artinya, wartawan tidak menggali dan menyelidiki kasus korupsi sendiri, melainkan menunggu hasil laporan para penyelidik resmi atau partikelir. Ketimbang memburu dan mengungkap koruptor, wartawan Indonesia hanya mengikuti mereka yang membongkar dan menyelidiki kasus-kasus korupsi.

Media di Indonesia, bukannya melakukan *investigating reporting* terhadap kasus-kasus korupsi, melainkan baru pada tahap *reporting on investigation*. Media-media di Indonesia masih sedikit sekali menyediakan laporan mengenai korupsi, kolusi, dan penyimpangan lain, yang betul-betul merupakan hasil penyelidikannya sendiri. (Kalam, 2013)

Tidak terpenuhinya harapan mengenai kontrol sosial terhadap fenomena korupsi di Indonesia melalui pemberitaan media massa, maka peneliti mencoba untuk menghubungkan peranan ini dengan media yang lain, yakni film. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa film terbagi menjadi 2, yakni *mainstream* (komersial) dan *sidestream* (independen). Sedangkan untuk film-film komersial masih sangat sedikit yang mengangkat tema korupsi, sehingga peneliti menggunakan film-film independen sebagai objek dalam penelitian ini.

Secara umum beberapa karakteristik film independen adalah menawarkan tema yang beragam. Tema-tema sederhana, yang justru dengan kesederhanannya dapat menembus ketidaksederhanaan, yang luput dari perhatian masyarakat. Kemudian karena sifatnya sebagai alternatif,

bukan komersil, membuat film independen penuh dengan eksplorasi subyektif dari si pembuat. Sehingga menurut peneliti, film independen bisa menjadi lebih jujur dibanding film komersial dalam mengungkapkan fakta atau menjadi kontrol sosial terhadap fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia.

Terdapat beberapa film independen yang mengangkat tema korupsi di Indonesia, di antaranya *Segelas Kopi Manis* (2008), *Sekolah Kami Hidup Kami* (2008), *Palak* (2012), dan *Kita vs Korupsi* (2012). Film-film tersebut adalah film yang terdaftar pada [www.filmindonesia.or.id](http://www.filmindonesia.or.id). Dari sekian film independen yang terdaftar, peneliti memilih Film *Kita vs Korupsi* dan *Palak* sebagai objek penelitian karena menurut peneliti film tersebut adalah yang paling baru di antara film-film lain. Selain itu, Film *Palak* juga berhasil menjadi finalis di beberapa festival tingkat nasional maupun internasional, di antaranya adalah festival Sinema Perancis 2012, Film Pendek Fiksi Naratif 2013, dan Festival Film Solo 2013. Untuk film *Kita vs Korupsi* adalah kompilasi 4 film pendek yang digagas oleh Badan Independen KPK dan TII, di antaranya adalah *Rumah Perkara*, *Aku Padamu*, *Selamat Siang, Risa!*, dan *Psssttt... Jangan Bilang Siapa-Siapa* yang semuanya merupakan cerminan dari kehidupan nyata tentang budaya korupsi yang terjadi di Indonesia. Film ini cukup berhasil mendapatkan antusiasme masyarakat secara umum, terbukti telah terselenggaranya pemutaran melalui jalur non komersil di 12 kota di Indonesia, di antaranya Bandung, Surabaya, Kediri, Balikpapan, dan Palembang. Sehingga



beberapa film independen tersebut cocok dijadikan sebagai objek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis, menggunakan pandangan Fairclough. '[A]nalisis wacana berarti analisis hubungan antara penggunaan bahasa yang konkret dan struktur sosial dan budaya yang lebih luas (Ibrahim, 2009, hal 244). Sehingga dengan menggunakan analisis wacana kritis, harapannya peneliti bisa menjelaskan mengenai film independen kaitannya dengan perannya sebagai alat kontrol sosial dalam mewacanakan korupsi yang terjadi di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana korupsi diwacanakan dalam film-film independen Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengungkap korupsi yang diwacanakan dalam film-film independen Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemaparan terkait wacana korupsi dalam film-film independen Indonesia.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Film sebagai Praktik Sosial

Graeme Turner menjelaskan dalam bukunya, salah satunya mengenai film naratif. Turner (1996, hal. 78) menyatakan '[b]ahwa film adalah narasi-mereka bercerita. Bahkan jika film berasal dari kejadian nyata tetap akan ter-fiksi-kan untuk menghasilkan drama, menghindari diisi tokoh-tokoh minor, atau mudahnya menjadi lebih menghibur'. Apa yang jelas menurut Turner adalah bahwa dunia datang kepada kita dalam bentuk cerita. Sejak awal, masa anak-anak kita, dunia diwakili kepada kita melalui cerita melalui orang tua, membaca melalui buku-buku, diceritakan ulang oleh teman-teman, mendengarkan percakapan, dan lain-lain (Turner, 1996).

Selain itu, Turner juga menjelaskan mengenai idiologi di dalam teks. Menurut Turner (1996, hal. 171) menjelaskan hal yang menjadi '[t]itik awal merupakan hal yang sederhana, idiologi yang dibaca dari teks film, sadar atau tidak sadar, hubungan antara setiap teks dan budaya dapat dilacak ke akar idiologis'. John Ellis (1982:74) di dalam buku Graeme Turner (1996, hal 176) menjelaskan bahwa:

...[g]agasan idiologi umum diasumsikan oleh film-film naratif. Asumsi ini ditetapkan melalui pengulangan. Karakteristik reproduksi idiologi adalah yang membawa kita menjadi menganggap hal-hal, kecuali yang secara khusus bertentangan. Namun pengulangan sendiri bukan karakteristik dari teks film. Pasti ada beberapa hal yang diberikan, seperti pemberian makna tertentu, asumsi-

asumsi tertentu, tapi hal-hal tersebut ada untuk mengambil resiko, untuk bekerja melalui masalah ideologi.

Beberapa pembuat film akan bergerak lebih jauh lagi, menganggap diri mereka adalah menumbangkan atau menentang makna dominan. '[M]isalnya dalam film Ocker Australia, adalah bentuk film narasi populer yang membawa makna *subversive* dari beberapa pola dominan. Hasilnya adalah bahwa film seperti itu secara kritis terjepit, tetapi berhasil mendapatkan *audience* mereka. Hal ini penting dalam melihat sifat dinamis dari ideologi' (Turner, 177).

Peneliti menggunakan dua film independen yang juga termasuk dalam tipe film naratif. Film-film tersebut disebut naratif karena sifatnya yang bercerita. Sehingga teori Graeme Turner yang menjelaskan film sebagai praktik sosial sesuai dengan penelitian ini karena peneliti membahas korupsi yang merupakan suatu praktik sosial yang diwacanakan dalam film-film independen.

### 1.5.2 Isu Sosial dan Media Massa

[M]enurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :

1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.

2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb (Godam, 2008).

Salah satu isu yang menempa media massa di hampir seluruh dunia adalah globalisasi. Globalisasi tidak mengenal batas-batas negara. Begitu juga dengan media yang mempengaruhi dan dipengaruhi globalisasi. Peran media dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan masyarakat modern (era globalisasi), menurut McQuil dalam bukunya *Mass Communicatin Theories* (2000 : 66), ada enam perspektif di antaranya :

**Pertama**, melihat media massa sebagai *window on event and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Dari perspektif ini, film independen sebagai salah satu media massa, bisa menunjukkan kepada khalayak mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

**Kedua**, media juga sering dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang



menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, *angle*, arah dan *framing* dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, film independen bisa memberikan tontonan yang jujur mengenai fenomena sosial yang terjadi di Indonesia tanpa batasan dan larangan dari pihak-pihak tertentu.

**Ketiga**, memandang media sebagai *filter*, atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk *content* yang lain berdasar standar para pengelolanya. Di sini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian. Jika dilihat dari persepektif ini, maka film independen bisa menjadi *gatekeeper* untuk mengarahkan konten film yang tidak banyak dibahas oleh film-film pada umumnya, tema yang seharusnya krusial untuk dibahas dan disampaikan kepada masyarakat.

**Keempat**, media acapkali pula dipandang sebagai *guide*, penunjuk jalan atau *interpreter*, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam. Keberagaman alternatif tersebut yang bisa disediakan oleh film

independen. Beberapa tema yang diangkat dalam film, kadang masih tidak umum untuk dibicarakan dan dikaryakan. Film independen mampu memberikan *guide* melalui penuturan dalam film.

**Kelima**, melihat media sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Dengan adanya film-film independen dan ideologi yang disampaikan oleh pembuat film, harapannya masyarakat bisa menjadi sadar dan memberikan *feedback* terkait hal tersebut. *Feedback* menunjukkan transformasi dari ketidaktahuan menjadi sebuah pengetahuan.

**Keenam**, media sebagai *interlocutor*, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu-lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. Dengan adanya keberagaman tema yang disampaikan oleh film independen, memungkinkan penonton dan pembuat film bisa berinteraksi satu sama lain. Sehingga pergerakan sosial akan lebih cepat tercapai (Ulum, 2014).

Dengan kata lain, peran media dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana *diversion*, pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan, mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi media merupakan konsumsi otak

bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media akan mempengaruhi realitas subyektif pelaku interaksi sosial. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial. Informasi yang salah dari media akan memunculkan gambaran yang salah pula terhadap objek sosial itu. Karenanya media dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian media. Menurut peneliti, film independen sebagai media alternatif lebih banyak melakukan bentuk eksplorasi dan dekonstruksi dari realitas sosial yang ada. Sehingga film yang dihasilkan pun bisa beragam dan tidak jarang berasal dari lingkungan sekitar yang kadang luput dari perhatian. Selain itu, tema-tema yang diangkat biasanya adalah hal yang penting disampaikan kepada masyarakat. Sehingga, film independen menjalankan peran media massa yang seharusnya.

### **1.5.3 Wacana Korupsi di Media Massa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai '[p]enyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik,

baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Selain itu, ada juga pengertian korupsi menurut Brooks, yakni dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi' (Ma'ruf, 2013). Sehingga bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan, bisa dalam bentuk uang, politik, jabatan, dan lain-lain yang berdampak pada kerugian diri sendiri maupun orang lain.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus korupsi yang dianggap sebagai skandal korupsi besar, di antaranya adalah kasus korupsi Bank Century, BLBI, PLTU Paiton I Probolinggo, Soeharto dan keluarga, HPH dan dana reboisasi, dan Edi Tansil / PT. Golden Key. Dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang meningkat dari tahun 2012 ke 2013, menunjukkan bahwa korupsi adalah tindakan pidana yang membutuhkan perhatian khusus.

Media massa secara umum memiliki 5 fungsi utama, yaitu fungsi informatif, pengawasan (*surveillance*), penghubung (*correlation*), pentransfer budaya (*transmission*), dan hiburan (*entertainment*). Peran penting media massa di bidang pencegahan korupsi, antara lain, bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi kepada masyarakat mengenai makna korupsi. Hal ini



bertujuan agar masyarakat mengetahui perbuatan yang termasuk korupsi dan tidak korupsi. '[M]edia sebagai salah satu sumber informasi publik diharapkan bisa menjadi alat pendorong berjalannya 3 prinsip pemerintahan (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi)' (Kalam, 2014).

Selain itu, '[m]edia massa berperan dalam meletakkan landasan demokratisasi kehidupan bernegara, dengan mempercepat proses peralihan, dari pemerintahan yang otoritarian, menuju kepada tatanan bernegara demokratis' (Susanto, 2009:8). Dengan kata lain, media mampu menyebarkan pesan bernilai positif untuk mendukung kehidupan bernegara, secara serentak dengan kecepatan tinggi. Karena itu, sangat beralasan jika sejumlah peneliti komunikasi massa, menyebutkan bahwa media merupakan agen perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku di masyarakat.

Sayangnya '[p]emilikan media oleh perorangan membawa bahaya yang lain, yakni bahaya konglomerasi media-massa, pemusatan pemilikan media dalam tangan segelintir orang saja' (Pope 2003, hal. 221). Padahal media harus independen dan tidak memihak, seperti dikemukakan oleh McQuail (2005:58) dalam jurnal milik Dr. Eko. "media beroperasi di ruang publik sesuai kepentingan pengguna, kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan konten simbolik, dan partisipasi bersifat

professional, terarah serta bebas nilai kepentingan”. Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana media mampu bersikap independen, ketika dikaitkan dengan ideologi pemberitaan ideal lepas dari unsur kepentingan bisnis.

[I]ndependensi media adalah sebuah konsep yang sangat rumit. Secara umum, independensi adalah ide bahwa wartawan harus bebas dari bentuk campur tangan apa pun ketika menjalankan dan mempraktekkan profesinya. Dalam kenyataan, pemilik media campur tangan setiap hari dalam tugas pekerjaan para wartawan yang bekerja untuk mereka. (Pope 2003, hal 223)

Seringkali media justru dipakai sebagai alat pembenaran atas suatu kasus tertentu. Inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya salah pengertian pada masyarakat sebagai *audience*. Menurut peneliti, *audience* adalah konsumen yang menikmati hasil produksi industri media secara langsung. Sedangkan media, bukan hanya bisa berperan menjadi pemberi informasi, tetapi media juga bisa melakukan hal-hal yang bersifat provokasi dan mempengaruhi opini para *audience*. Jika hal ini, akan menjadi batu sandungan proses demokrasi.

Dalam dinamika reformasi politik, media massa gencar memberitakan kasus korupsi. Tetapi partisipasi masyarakat tampaknya tidak maksimal dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sebab, dalam belenggu tradisi “melindungi” tokoh, maka keterlibatan masyarakat menjadi tidak bebas nilai atau subyektif. Artinya, nilai kelompok, perilaku etnosentrisme jauh lebih kuat

dibandingkan dengan kesalahan melakukan korupsi, yang merugikan rakyat.

Di sisi lain, mengingat media massa juga cenderung tidak mengikuti penyelesaian masalah korupsi sampai tuntas, maka masyarakat tidak konstan menjaga semangat pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, media harus mendorong munculnya keberanian mengungkap kasus korupsi. Sebab meski Indonesia sudah masuk dalam kebebasan komunikasi, tetapi masyarakat masih saja takut untuk mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, tokoh politik ataupun mereka yang memiliki keistimewaan dalam masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Karena itu, tidak heran, jika ada kasus korupsi yang tidak diekspose ke publik bahkan penyelesaian kasus – kasus korupsi, seolah-olah sebatas perundingan antar pihak terkait yang hanya merujuk kepada penyelesaian administratif dan janji. Padahal di sisi lain, masyarakat berharap ada tindak lanjut yang konkrit yang bisa diperoleh, melalui pemberitaan media massa.

Media massa yang dibahas di atas adalah media konvensional, seperti TV, koran, dan radio yang jumlah pemilik medianya terbatas. Sehingga sangat memungkinkan konten medianya diatur oleh para pemilik media tersebut. Sedangkan film independen sebagai film *sidestream* tidak dikorporasikan dan dimiliki oleh perorangan atau tim (crew). Sehingga konten yang

disampaikan masih sangat bebas. Semakin sedikit campur tangan, maka semakin memungkinkan bentuk independensi dan keakuratan konten masih bisa terjamin. Dengan begitu, fenomena sosial sangat besar kemungkinannya untuk bisa diwacanakan dalam sebuah film independen, termasuk salah satunya adalah korupsi.

#### **1.5.4 Film Independen sebagai Alat Kontrol Sosial**

Dengan melihat keadaan media massa konvensional sejauh ini seperti disebut sebelumnya, maka diperlukan adanya media alternatif yang sifatnya lebih bebas dan obyektif. Salah satu bentuknya adalah film independen. Film independen yang dibuat tanpa bergantung pada para pemilik modal dan memiliki ide yang lebih orisinal bisa memberikan alternatif tontonan yang lebih jujur kepada masyarakat. Para pembuat film independen yang sekaligus berperan sebagai warga negara (masyarakat) bisa melakukan bentuk kontrol sosial dengan keadaan yang terjadi di Indonesia dalam bentuk film.

‘[D]engan demikian, dana utama dari produksi film bukan dari seorang yang berduit, tetapi dari pencarian melalui berbagai upaya’ (Prakosa 2005, hal. 4). Yang menarik, pada situasi seperti ini adalah munculnya sikap progresif sebuah dunia yang awalnya kurang diperhatikan, kini telah mengganti posisi film cerita yang awalnya menjadi “jagoan” dalam perfilman Indonesia, kini mau



tidak mau telah digantikannya oleh film independen yang berbagai durasinya ada yang pendek, juga ada yang panjang. '[F]ilm berdurasi pendek banyak diproduksi oleh masyarakat di seluruh Indonesia, dan bahkan bukan diproduksi di kota-kota besar saja, tetapi di berbagai kota di seluruh provinsi di Indonesia' (Prakosa 2005, hal.5).

Film independen yang dikategorikan film pinggiran ini hidup, bergerak, dan membangun jalannya dari bawah tanah. Pada era ketika Orde Baru masih berkuasa, film yang berkategori ini hampir tidak ada sama sekali. Hanya menjadi bagian dari proses pembelajaran pada sekolah-sekolah film bagi mahasiswa pemula yang ingin terjun pada dunia film.

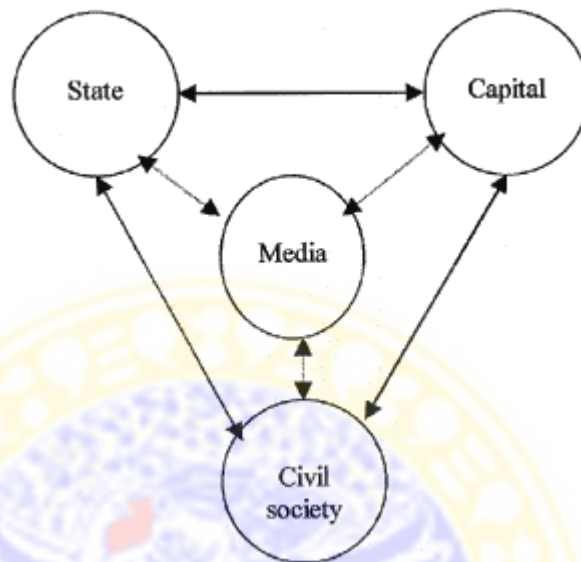
Sekarang lain. Menjangkitnya teknologi di segala bidang termasuk pada bidang perfilman direspon oleh kalangan pecinta film yang bukan "orang sekolahan film" dengan munculnya teknologi handycam dan piranti editing rumahan yang mudah dioperasikan. Bahkan sekarang tumbuh kembangnya bisa dikatakan pesat seiring kreatifitas mereka menyelenggarakan pemutaran-pemutaran keliling dengan sistem "ngamen" maupun layar tancep di sekolahan, kampus, kafe, yang di-set seperti bioskop "dadakan". Ini merupakan bentuk aktualisasi dan protes kepada pemerintah lewat karya amatiran yang ternyata dari usaha mereka tersebut muncul sutradara-sutradara berbakat yang lahir dari film indie, bahkan sampai ke level festival nasional. (Widagdo, 2011)

Bentuk aktualisasi diri dan protes kepada pemerintah menunjukkan bahwa film independen juga melakukan peranannya sebagai alat kontrol sosial.

### 1.5.5 Hubungan Media dengan Tiga Sisi Pilar Masyarakat

John Galtung, salah satu peneliti yang lahir di Norwegia menghasilkan model tiga sisi pilar masyarakat, yakni negara atau

pemerintah, modal atau kekuatan pasar, dan masyarakat sipil atau non-pemerintah dan non-kegiatan komersial.



**Gambar 1.1. Bagan Tiga Pilar Masyarakat**

Dalam model ini, media tidak selalu berada di puncak segitiga, melainkan menggapung di antara pilar. Dalam sejarah banyak negara, media telah menemukan tempat mereka pertama dekat dengan negara, kemudian beranjak menuju masyarakat sipil, dan baru-baru ini, semakin dekat dengan pasar modal.

Galtung tidak menyangka kekuatan pasar bisa benar-benar menyerap masyarakat secara global, ia juga melihat kekuatan yang berkembang di masyarakat sipil dengan gerakan baru. Dengan demikian, media mengambil tempat yang menantang di bidang konflik. Media adalah saluran penting, tidak hanya untuk masyarakat sipil dalam kaitannya dengan negara dan modal, tetapi

juga dalam komunikasi antara negara dan modal dalam rangka memastikan adanya ruang publik dan adanya dialog di masyarakat. Jika media berhasil mencapai posisi yang kuat dan independen dalam segitiga ini, menurut Galtung, media bisa dianggap sebagai status pilar keempat dalam struktur kekuasaan masyarakat. (Journet, 2002)

Sebagai *setting-an* dasar, namun tetap menjadi pertanyaan inti, apa hubungannya antara kekuatan media dengan kekuasaan orang. Menjadikan kebebasan berbicara sebagai prinsip dasar, tugas media, adalah untuk melayani orang-orang dan bukan mereka yang memegang kekuasaan, dan malah menjadikan media sebagai kekuatan politik atau ekonomi. Dengan demikian, pada gambar Galtung di atas, media seharusnya lebih dekat dengan masyarakat sipil. Hal ini tidak sehat bagi demokrasi, jika media harus bergerak dari ranah politik ke ekonomi dan kemudian menjadi alat bagi kaum elit kepada masyarakat, sedangkan kebanyakan orang masih terus berjalan di jalan mereka masing-masing sebagai konsumen dan penonton.

Dari posisi tersebut, di Amerika Serikat mulai mencari bentuk-bentuk baru jurnalisme, tidak hanya berupa investigatif, tetapi juga melalui jurnalisme sipil atau publik mencari permasalahan yang mendasar (*grass root*). Jurnalisme sipil atau warga berusaha untuk mendukung demokrasi lokal, tidak

membanjiri masyarakat dengan informasi yang disaring oleh kaum elit, tetapi dengan membawa warga untuk membahas dan bertindak atas masalah yang menyangkut mereka.

Hal ini sama halnya dengan kemunculan film independen, memberikan media alternatif bagi masyarakat, tanpa terjebak oleh kepentingan kaum elit atau kapitalis yang harus memiliki modal besar dalam pengadaannya. Jika dihubungkan dengan bagan Galtung di atas, maka film independen adalah salah satu media yang muncul dari kalangan masyarakat sipil akibat kekecewaan atas peran media massa secara umum yang seharusnya bisa mengambang di antara 3 pilar, tapi pada kenyataannya tidak.

Dalam demokrasi, masyarakat sipil memiliki peranan penting. Demokrasi dan masyarakat sipil (*civil society*) bagaikan dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi. Dengan *civil society* yang kuat, demokrasi akan berjalan dengan baik (Putnam, 1993). Dan dalam suasana negara yang demokratis, *civil society* akan berkembang dan tumbuh dengan kuat pula. Nurcholish Madjid (1999) membuat metafor yang cukup menarik, *civil society* adalah “rumah” persemaian demokrasi. Jadi demokrasi tidak hanya tercermin dalam pemilu yang bebas dan demokratis, tetapi juga diperlukan persemaian dalam “rumah”, yaitu *civil society*.

Larry Diamond (1994) mengatakan bahwa *civil society* memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tumbuhnya

demokrasi. *Pertama*, *civil society* menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara. Asosiasi independen dan media yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara melalui kontrol publik. *Kedua*, beragam dan pluralnya dalam masyarakat sipil dengan berbagai kepentingannya, bila diorganisasi dan dikelola dengan baik, maka hal ini dapat menjadi dasar yang penting bagi persaingan yang demokratis. *Ketiga*, akan memperkaya peranan partai-partai politik dalam hal partisipasi politik, meningkatkan efektivitas politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan (*citizenship*). *Keempat*, ikut menjaga stabilitas negara. Dalam arti bahwa *civil society*, karena kemandiriannya terhadap negara, mampu menjaga independensinya yang berarti secara diam-diam mengurangi peran negara. *Kelima*, sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru. *Keenam*, menghalangi dominasi rezim otoriter.

*Civil society* merupakan salah satu indikator cerminan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Dan merujuk pada ciri demokrasi adalah adanya partisipasi efektif rakyat dalam pembuatan keputusan publik yang menyangkut nasib dan kepentingan rakyat dan adanya kontrol



sosial untuk mengawasi pemerintah sehingga masyarakat yang beradab adalah salah satu syarat penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Dan kembali pada sejarah Indonesia, masa Orde Baru selama 32 tahun bisa dikatakan demokrasi seperti telah “mati”. Mati dalam artian tanda kutip karena memang pelaksanaannya hanya sebatas pemilihan umum, itu pun tidak lepas dari kediktatoran pemerintahan yang berkuasa pada masa itu sehingga rakyat selama 32 tahun terampas haknya untuk menyuarakan pendapatnya. Dan ketika masa reformasi, *good governance* digadang-gadang sebagai sebuah pandangan atau sistem yang dapat mewujudkan sebuah demokrasi yang murni di Indonesia.

Istilah *good governance* yang dinyatakan oleh **Garry Stocker** (1998), yang berpendapat bahwa pemerintahan itu harus fleksibel. *Good governance* bersumber dari tujuan negara dan juga fungsi negara serta fungsi pemerintahan yang sistematis dan terpadu sehingga mewujudkan *good governance* yang selanjutnya terciptalah *clean goverment* yang terkait dengan akuntabilitas publik serta kontrol publik dan akhirnya terwujudlah demokrasi yang murni. Setidaknya yang menjadi dasar berkembangnya demokrasi di Indonesia ini di pengaruhi oleh beberapa hubungan diantara ketiga pilar penyokong demokrasi, *civil society*, market dan *state*.

## 1. *Civil Society* (Masyarakat Sipil)

Pengertian *Civil Society* menurut Jean. L. Kohen dan Andrew Arato (1992) adalah *Modern Civil Society is based on egalitarian principle and universal inclusion experience in articulating the political will and in collective decision making is crucial to the reproduction of democracy. Civil Society* yang dimaksud adalah suatu masyarakat sipil yang didasari oleh kesetaraan dan selain itu juga masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan umum serta masyarakat yang didasari oleh demokrasi sehingga dapat membentuk masyarakat yang mandiri.

*Civil society*, dua kata tersebut kurang populer di ruang lingkup masyarakat Indonesia jika diubah ke bahasa Indonesia yang artinya adalah masyarakat sipil. Kebanyakan masyarakat pada umumnya mengaitkan antara kata sipil dengan militer. Berbeda dengan masyarakat madani, meski tidak semua memahami apa arti masyarakat madani tersebut, namun sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun sebenarnya memang tidak ada perbedaan antara masyarakat madani, *civil society* dan masyarakat sipil tersebut.

Suatu kondisi kehidupan masyarakat yang tegak diatas prinsip-prinsip egaliterisme yang sederajat dan inklusivisme universal. Secara konkret, masyarakat sipil bisa terwujud melalui berbagai organisasi yang berada di luar institusi pemerintah yang mempunyai cukup

kekuatan untuk melakukan *counter* hegemoni yang sudah pasti dapat memengaruhi kebijakan umum. (Pratama, 2014)

## 2. *Private Sector (Market)*

Dalam mengelola hubungan yang baik dengan pihak swasta sering kali kita dengar istilah *private sector*. Pada dasarnya *private sector* memiliki tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat pada kinerja perusahaan dengan memperhatikan juga arus *balance sheet* perusahaan apakah sedang mengalami keuntungan atau kerugian karena di sinilah tujuan utama dari sektor privat. Sektor privat berbeda dengan sektor publik yang lebih mementingkan kepentingan umum, sektor privat sangat lebih mementingkan pemegang sahamnya, bagaimana menghasilkan tingkat keuntungan yang besar sehingga nantinya dari jumlah profit yang makin meningkat tersebut akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari saham yang makin besar kepada para pemegang saham yang ada. Hal ini memaksa para manajemen perusahaan untuk berusaha secara maksimal dan melakukan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk dapat memenuhi target keuntungan tersebut.

Pada saat ini sektor privat sendiri selain tetap mempertahankan tujuannya yang selalu berorientasi pada

keuntungan tetapi juga sisi politisnya sudah mulai diperhatikan. Dalam hal ini peran pemerintah melalui regulasi-regulasi yang mereka luncurkan serta pengawasan yang ada membuat sektor privat mau tidak mau harus memperhitungkan sisi politis yang ada. Sebagai contoh sektor privat dipaksa untuk mengikuti peraturan bahwa harga atap sebuah produk harus pada nilai tertentu dan sektor privat wajib mematuhi hal tersebut, contoh lainnya mengenai monopoli, sektor privat dipaksa untuk tidak melakukan adanya sistem kartel dan monopoli yang tentu saja akan merugikan masyarakat banyak. (Pratama, 2014)

### 3. *State* (Negara)

*State* (negara) adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Menurut **Abraham**, arti sebuah negara menjadi dua, negara dalam arti objektif dan negara dalam arti subjektif. Negara dalam arti objektif berarti segala sesuatu yang menyangkut ruang lingkup kedaulatan suatu kelompok komunitas masyarakat, dimana didalamnya terdapat struktur kehidupan sosial atas kehendak organ masyarakat pada suatu wilayah tertentu; dengan tujuan

menjalankan segala bentuk aktivitas hidupnya. Sedangkan negara dalam arti subjektif diartikan dengan adanya sekelompok komunitas manusia yang menghendaki suatu bentuk teritorial kedaulatan, yang kemudian dibentuk semacam konsensus atau kontrak sosial. Kontrak sosial itu tak lain ialah mufakat bersama dengan tujuan untuk membentuk wilayah kedaulatan sesuai kehendak komunitas dan memiliki seorang pimpinan komunitas sosial. Negara bukan sekadar sekumpulan keluarga belaka atau suatu persatuan organisasi profesi, atau penengah di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara perkumpulan suka rela yang diizinkan keberadaannya oleh negara. Dalam suatu komunitas politik yang diorganisir secara tepat, keberadaan negara adalah untuk masyarakat dan bukan masyarakat yang ada untuk negara. Peralpnya, keberadaan negara bermula dari perkembangan manusia (rakyat) yang kompleks dengan segala permasalahannya sehingga dibutuhkan adanya sebuah organisasi yang dilengkapi kekuasaan, disepakati bersama oleh rakyat tersebut, dan berfungsi menyelesaikan perselisihan untuk mengatur dan menciptakan ketentraman serta kedamaian dalam hubungan kemasyarakatan.

Logikanya, jika misalnya, keadaan rakyat dengan segala kompleks permasalahannya telah tentram dan damai maka



rakyat tidak memerlukan adanya organisasi kekuasaan lagi. Dengan kata lain, bisa saja organisasi kekuasaan tersebut dibubarkan keberadaannya oleh rakyat. Akan tetapi, logika ini mungkin akan sangat sulit terealisasi karena kompleksitas permasalahan rakyat selalu ada seiring dengan berkembangnya kepentingan manusia. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa negara boleh menerapkan represifitas terhadap rakyat, karena hakekatnya keberadaan negara adalah untuk rakyat bukan rakyat yang ada untuk negara.

Keberadaan negara menjelma dalam sistem penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh tiga lembaga kekuasaan negara. Yakni lembaga legislatif (sebagai pembuat undang-undang), lembaga eksekutif (yang menjalankan undang-undang) dan lembaga yudikatif (pengadil terhadap pelanggaran atas undang-undang). Lembaga-lembaga kekuasaan negara ini menjalankan fungsinya dengan prinsip demokrasi (penyelenggaraan negara dari, oleh, dan untuk rakyat). (Pratama, 2014)

#### **1.5.6 *Critical Discourse Analysis***

*Discourse* atau wacana adalah proses pengembangan dari komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem

kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana, pesan-pesan komunikasi, seperti kata, tulisan, gambar, dan sebagainya, keberadaannya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Semua itu dapat berupa nilai-nilai, ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan dan lain-lain.

*Critical Discourse Analysis* atau yang disingkat dengan CDA adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang akan atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang cenderung mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan (Darma, 2009). Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya sebuah kepentingan. Jadi, analisis wacana yang dimaksudkan adalah upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subyek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang penulis dengan mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui.

Dalam kenyataannya, wujud dari bentuk wacana itu dapat dilihat dalam berbagai karya si pembuat wacana, yaitu teks. Teks di dalam media adalah hasil proses wacana media (*media discourse*), yang terdapat nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan media. Hal ini memperlihatkan bahwa media tidak netral saat

mengkonstruksi realitas sosial. Media mengikutsertakan perspektif dan cara pandang mereka dalam menafsirkan realitas sosial. Mereka memilih aspek-aspek mana yang harus ditinjalkan dan dihilangkan, menentukan dari sisi mana peristiwa yang ada disoroti. Dalam penelitian ini teks merupakan film, lebih khususnya adalah scene-scene dalam film-film *Palak* dan *Kita vs Korupsi*.

CDA menggunakan bahasa dalam teks yang dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa yang dianalisis pada CDA tidak hanya menggambarkan aspek bahasa saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks dalam hal ini berarti bahasa dipakai untuk tujuan tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Habermas (1973) berpendapat bahwa, CDA bertujuan membantu menganalisis dan memahami masalah sosial dalam hubungannya antara ideologi dan kekuasaan.

Analisis Norman Fairclough didasarkan pada pertanyaan besar, bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Titik perhatian Fairclough adalah melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu. Dalam hal ini dibutuhkan analisis menyeluruh. Bahasa secara sosial dan kritis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipisahkan

pada bagian bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Fairclough, 1995).

Fairclough juga memusatkan perhatian bahwa wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial yang mengandung implikasi. Pertama, wacana adalah bentuk dari tindakan. Seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat realitas dunia. Pandangan ini tentu saja menolak pandangan bahasa sebagai bentuk individu. Kedua, model ini mengimplikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial. Dalam hal ini, wacana terbagi oleh struktur sosial, kelas, dan relasi sosial lain yang diubungkan dengan relasi spesifik dari institusi tertentu seperti pada buku, pendidikan, sosial, dan klasifikasi (Fairclough, 1995).

Selanjutnya Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis *discourse practice*, analisis *sociocultural practice*. Pada film *Palak dan Kita vs Korupsi*, teks yang dianalisis adalah scene-scene dalam film (seperti setting, dialog, dan ekspresi pemeran). Sedangkan analisis *discourse practice* dilakukan dengan menganalisis proses produksi film-film tersebut, dan *sociocultural practice* yang mengasumsikan bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana diskursus muncul dalam media. *Sociocultural practice*

ini memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi ia menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Fairclough membuat tiga level analisis pada *sociocultural practice*, yaitu :

- Situasional

Suatu kondisi atau suasana yang khas, unik, sehingga satu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Dalam penelitian ini, situasional dilihat dari kondisi sosiokultural ada di masyarakat sekitar mengenai pemahaman korupsi sesuai dengan tahun produksi film, yaitu 2012.

- Institusional

Pada level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi atau media, dalam hal ini adalah pembuat film *Palak dan Kita vs Korupsi*.

- Sosial

Aspek sosial lebih mengarah pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini menentukan siapa yang berkuasa dan nilai-nilai apa yang dominan dalam Film *Palak dan Kita vs Korupsi*.



### 1.5.7 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini diajukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai wacana korupsi atau film independen.

Penelitian pertama adalah Makna Film Independen di Kalangan Film Maker Kota Bandung. Penelitian tersebut dilakukan oleh Yulviana Gitria Putri, Atwar Bajari, Hj. Kismiyati El Karimah dari Jurusan Ilmu Manajemen Komunikasi Universitas Padjajaran yang berupa jurnal. Penelitian tersebut berfokus pada film independen dan film maket yang berada di Kota Bandung. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti ini berfokus pada korupsi yang diwacanakan dalam film-film independen Indonesia secara umum, tidak hanya berasal dari Bandung.

Penelitian selanjutnya adalah Narasi Korupsi dalam Film Indonesia (Analisis Naratif Korupsi dalam Film “*Kita vs Korupsi*”). Penelitian tersebut dilakukan oleh Dilla Reswa. Dalam penelitian tersebut, peneliti memberikan gambaran mengenai korupsi yang diangkat dalam film Indonesia, yakni film *Kita vs Korupsi*.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan narasi terhadap film, tetapi juga mengaitkan ideologi

yang ingin disampaikan melalui film independen dan peran film independen sebagai alat kontrol sosial.

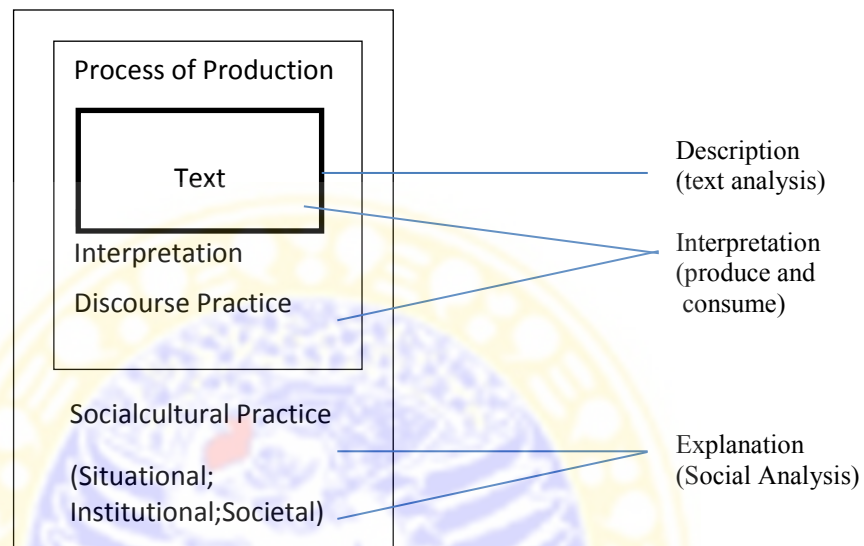
Penelitian selanjutnya adalah Wacana Korupsi pada Lirik Lagu-Lagu Slank. Penelitian tersebut dilakukan oleh Vena Maria, sebagai skripsi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Penelitian ini berfokus pada lagu-lagu Slank yang mewacanakan anti korupsi kepada masyarakat. Penelitian tersebut yang paling mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang diajukan peneliti adalah objek yang digunakan untuk mengupas wacana korupsi. Peneliti tersebut menggunakan lirik-lirik lagu Slank. Sedangkan peneliti menggunakan film-film independen Indonesia antara tahun 2010-2014 sebagai objek penelitian.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis (CDA)*, yang mendiskusikan teks-teks berdasarkan realitas sosial. Metode ini dipilih karena peneliti ingin membongkar teks dan mengaitkan teks dengan konteks sosial yang melingkupi teks.

CDA yang dipilih oleh peneliti adalah pandangan Fairclough. Adapun dimensi wacana dan analisis wacana dari Fairclough adalah sebagai berikut (Fairclough 1995, 98) :



Gambar 1.2. Model CDA : Norman Fairclough

### 1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif eksploratif, karena penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi korupsi yang diwacanakan dalam film *Palak* dan *Kita vs Korupsi*. Dengan mengeksplor kedua teks tersebut, peneliti dapat membongkar peran film independen sebagai alat kontrol sosial terhadap fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia.

### 1.6.3 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah *scene* dalam Film *Palak* dan *Kita vs Korupsi*, serta narasi.

#### 1.6.4 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah film-film independen Indonesia yang bertema korupsi, yakni *Palak* dan *Kita vs Korupsi*.

#### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan film-film independen Indonesia antara tahun 2010-2014, bertema korupsi, yaitu *Palak* dan *Kita vs Korupsi*.

#### 1.6.6 Teknik Analisis Data

Tahap awal, peneliti akan menonton dan memahami film *Palak* dan *Kita vs Korupsi*.

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan analisis menggunakan *Critical Discourse Analysis* (CDA) Norman Fairclough, yang membagi dalam tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis *discourse practice*, dan analisis *sociocultural practice*. Pada film-film tersebut yang dianalisis adalah scene-scene dalam film. Sedangkan analisis *discourse practice* dilakukan dengan menganalisis proses produksi film, dan *sociocultural practice* yang mengasumsikan bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana diskursus muncul dalam media. *Sociocultural practice* ini memang tidak berhubungan langsung

dengan produksi teks, tetapi ia menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami.

